



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 05 Januari 2018

Halaman: 2

PERENCANAAN ANGGARAN 2017 DINILAI TAK PRESISI

Potensi Silpa Ditaksir

Rp 220 Miliar

UMBULHARJO (MERAPI) - Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2017 Kota Yogyakarta berpotensi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta memperkirakan potensi Silpa APBD 2017 mencapai sekitar Rp 220 miliar.

"Potensi Silpa anggaran 2017 kami perkirakan Rp 220 miliar. Tapi itu baru perkiraan, karena belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan," kata Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Kadri Renggono, Kamis (4/1).

Pihaknya mengakui perkiraan Silpa APBD 2017 itu lebih besar dibandingkan Silpa APBD 2016 Kota Yogyakarta yang sekitar Rp 117 miliar. Berdasarkan analisa awal pihaknya, peningkatan Silpa itu karena beberapa faktor. Dari sisi serapan belanja dalam APBD 2017 hanya 87,6 persen senilai Rp 1,459 triliun. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan serapan belanja APBD 2016 yang mencapai 92 persen dari target.

"Masih kami evaluasi terkait belanja yang tidak maksimal. Ada beberapa organisasi perangkat daerah yang realisasinya kurang maksimal. Serapan yang rendah itu justru bukan dari instansi yang menangani teknis pekerjaan fisik," terangnya.

Dia menyebut realisasi belanja paling rendah dari OPD di Pemkot Yogyakarta yakni 68,71 persen. Sedangkan realisasi belanja paling tinggi mencapai 97,24 persen adalah Kecamatan Gedongtengen. Namun capaian serapan belanja itu, lanjutnya, bisa berubah karena selama seminggu ini masih ada kontra post pada sistem pembukaan. Kondisi itu memungkinkan ada koreksi misal ada kelebihan atau kekurangan bayar dalam APBD.

Potensi Silpa APBD 2017 yang lebih besar itu juga dinilai karena pengaruh dari sisi pendapatan yang naik. Dia menyatakan dalam APBD 2017 realisasi pendapatan melebihi target sekitar 1,4 persen atau senilai Rp 22,2 miliar. Realisasi pendapatan dalam APBD 2017 mencapai Rp 1,6 triliun dari target Rp 1,58 triliun. "Faktor pendapatan realisasinya naik dibandingkan tahun lalu.

Ini juga bisa mempengaruhi besaran Silpa," ujar Kadri.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri menyampaikan, Silpa merupakan salah satu instrumen untuk memproyeksikan defisit anggaran yang terencana. Silpa didapatkan dari faktor perhitungan proyeksi pendapatan, efisiensi belanja dan proyeksi belanja tak terealisasi misal gagal lelang.

"Ketiga faktor itu menjadi indikator perencanaan yang ditetapkan dalam APBD tidak presisi. Semakin besar Silpa, semakin besar deviasi angka perencanaannya. Tentu itu harus dievaluasi karena dalam catatan kami selama 2017 tidak ada kebijakan radikal yang menyebabkan pendapatan naik dari proyeksi atau belanja jadi sangat efisien," tandasnya.

Tindak Lanjut
 Untuk Dilanjut
 Untuk Diketahui
 (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005